

**PERAN FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA PROGRAM PENATAAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS**
(Studi Kasus di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat,
Kabupaten Karanganyar)

Wulan Ayuningtyas Agustin

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta

Email: ulan.ayu22@yahoo.com

Supriyadi S.N.

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta

Email: supriyadi.sn.su@gmail.com

Received: 07-05-2017

Accepted: 14-07-2017

Online Published: 12-10-2017

Abstrack

This research aims to find out the facilitator's role and inhibiting and supporting factors in the Community- Based Environment Arrangement Program (PLPBK) in Kemiri Village. The theory used in this research is Max Weber's Social Action Theory. The role of facilitator is the rational social action because the facilitator has contribution and purpose in performing community empowerment. The method employed in this research is descriptive with case study. The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting data used were interview, documentation study and direct observation. Data validation was carried out using source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. The result of research shows that facilitators serve to improve human resource quality through the activities of socialization, community facilitation and program evaluation as well as grant in the form of plan developer and construction executor. The inhibiting factors in PLPBK program included limited fund and limited construction tools. Meanwhile the supporting factors in PLPBK program included facilitator personnel, high participation of Kemiri Villagers and close relationship established between stakeholders in PLPBK program.

Keywords: Role of Facilitator, Community Empowerment, Community- Based Environment Arrangement Program

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit

memenuhi kebutuhan dasar tersebut (Anwas, 2014: 83). Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Permasalahan ini ditunjukkan dengan banyaknya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh yang identik dengan kemiskinan.

Permukiman menjadi bagian dari lingkungan hidup yang akan digunakan sebagai tempat tinggal dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi serta berhubungan dalam mewujudkan masyarakat yang tentram. Untuk mengatasinya pemerintah masih terus melakukan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atau inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta, dan lainnya), serta berkelanjutan.

Rumah Tidak Layak Huni salah satu program kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) yang menjadi rangkaian program PNPM

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Kabupaten

Karanganyar yang dijalankan oleh Pemerintah di lokasi kawasan prioritas adalah Desa Kemiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1-6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman itu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian juga bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah

kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Program ini merupakan reward yang diberikan oleh pemerintah bagi desa atau kelurahan yang memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM merupakan lembaga perwakilan masyarakat dengan kepemimpinan kolektif dari tingkat kelurahan yang dibentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat. Tujuan utama dari Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas permukiman.

Pemilihan masalah tentang Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai lokasi dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran fasilitator terhadap warga masyarakat dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas serta faktor pendukung

dan penghambat yang dialami fasilitator dalam melaksanakan program tersebut. Program PLPBK ini pada dasarnya dibuat dalam rangka upaya pembangunan masyarakat. Program ini masih tergolong baru dan belum tentu setiap daerah bisa mendapatkan bantuan dari program PLPBK ini. Maka untuk mengetahui bagaimana peran fasilitator kepada masyarakat dalam adanya program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kemiri yang ada di Kabupaten Karanganyar yang mendapatkan bantuan dari program PLPBK di tahun 2015.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu perpaduan antara jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran tentang suatu hal dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan, dan menganalisa data yang ada (Moleong, 2013:21). Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah fasilitator, masyarakat Desa Kemiri, dan perangkat Desa Kemiri.

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber aslinya secara langsung yang akan merespon atau memberi keterangan dalam penelitian. Data primer didapatkan dari keterangan yang diberikan oleh informan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip-arsip, buku-buku yang

berkaitan dengan bantuan/program PNPM untuk masyarakat miskin di daerah tertentu di Indonesia, yang mendapatkan bantuan pemerintah supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui cara wawancara secara langsung terhadap informan dengan pedoman wawancara, dokumentasi yang bersumber dari arsip-arsip dan dokumen yang terdapat pada berbagai instansi terkait, dan pengamatan atau observasi secara langsung.

Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas (kesahihan) data penelitian (Sutopo, 2002: 77). Teknik validitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dimana dalam model ini terdapat tiga komponen pokok menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, suatu bentuk analisis yang mempertegas atau memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Selanjutnya, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PLPBK di Desa Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar utamanya memperbaiki infrastruktur seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jamban, jalan, saluran, ruang terbuka hijau, taman dan pembangunan manusia. Dalam hal ini PLPBK difokuskan

pada program bantuan RTLH di Kabupaten Karanganyar khususnya Desa Kemiri. Proses PLPBK di Desa Kemiri berlangsung mulai dari bulan Januari 2015 hingga Januari 2016. Pendanaan RTLH dalam program PLPBK di Desa Kemiri ini dianggarkan Rp 15.000.000 untuk setiap unitnya. Dana tersebut dipegang oleh pemerintah desa (Bapak Lurah). Masyarakat yang mendapatkan bantuan program telah sepakat untuk tidak memegang uang bantuan tersebut secara langsung. Mereka menyerahkan kepada pemerintah desa untuk membelanjakan uang tersebut dengan bahan bangunan dan menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan material untuk membangun rumah bukan dalam bentuk uang.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat agar berdaya sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat merasakan kesejahteraan. Dalam hal ini, fasilitator merupakan pelaksana pemberdayaan masyarakat. Fasilitator berperan dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat dalam menerima program dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan program PLPBK di Desa Kemiri ini, fasilitator sangat berperan penting bagi masyarakat penerima bantuan program PLPBK maupun menjalin

relasi bagi pihak pemerintah desa hingga pusat untuk melaksanakan program dengan baik.

Program PLPBK di Desa Kemiri dimulai dengan tahap persiapan, tahap perencanaan dan pemasaran sosial, tahap pelaksanaan hingga tahap keberlanjutan. Fasilitator berperan di semua tahapan kegiatan berlangsung selama program tersebut dilaksanakan. Fasilitator yang bertugas di Desa Kemiri berjumlah 3 orang, yaitu Bapak Anung sebagai fasilitator sosial, Mbak Ika dan Ibu Dhanti sebagai fasilitator teknik. Peran fasilitator dijelaskan dalam setiap tahap kegiatan PLPBK di Desa Kemiri, yaitu: Pada tahap persiapan, fasilitator berperan sebagai **Sosialisator** yang ditunjukkan dengan peran mengadakan lokakarya di tingkat kabupaten yang menghadirkan semua SKPD terkait dengan perencanaan seperti DPU, Bappeda, BLH, Bapermasdes, dan DKP serta dinas-dinas lainnya. Fasilitator melakukan pendekatan di tingkat desa yang mencakup perangkat desa dan masyarakatnya. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan. Sosialisasi ini dilakukan di Aula Desa Kemiri untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat penerima bantuan mengenai program PLPBK salah satunya yaitu renovasi rumah tidak layak huni yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan diterima termasuk rumah layak huni. Tim fasilitator juga mengadakan

rembuk warga secara *door to door* di setiap RW. Rembuk warga merupakan lanjutan sosialisasi dari pengenalan program. Pada tahap perencanaan dan pemasaran sosial, fasilitator berperan sebagai **Penyusun rencana** yang ditunjukkan dengan peran merencanakan pelaksanaan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat desa dan perangkat Desa Kemiri. Perencanaan pelaksanaan program PLPBK ini disepakati bersama agar pelaksanaan program sesuai dengan visi dan tujuan program PLPBK diadakan di Desa Kemiri. Selanjutnya tim fasilitator melaksanakan pemasaran sosial yang dibantu dengan perangkat desa dan BKM yang melakukan pemetaan swadaya untuk mengidentifikasi lokasi dari potensi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, fasilitator berperan sebagai **Pelaksana konstruksi dan pendampingan masyarakat** yang ditunjukkan dengan peran melibatkan masyarakat dan mengorganisasikan mereka ke dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama program PLPBK. Selama proses pelaksanaan pembangunan, peran fasilitator yaitu meninjau dan memantau proses pembangunan rumah. Dalam hal sosial, fasilitator terus berperan untuk mendampingi masyarakat dan

menyadarkan masyarakat untuk memiliki permukiman yang layak, bersih dan sehat. Pada tahap keberlanjutan, fasilitator berperan sebagai **Evaluator** dimana fasilitator melakukan evaluasi terhadap program yang telah selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara tertulis dan dijadikan laporan akhir. Laporan akhir ini memuat rincian dana yang telah digunakan, dokumentasi lapangan dan proses pembangunan, dan lain-lain. Dalam laporan akhir ini dapat dilihat perencanaan hingga pelaksanaan akhir yang kemudian diserahkan kepada koordinator kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung fasilitator dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di program PLPBK. Faktor yang menjadi penghambat di antaranya yaitu **Kurangnya Pendanaan**, meskipun dana Rp 15.000.000 diberikan dalam bentuk bahan material penerima bantuan masih merasa kurang dengan dana dan bahan material yang telah diberikan akibatnya mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli kekurangan bahan material, membayar tukang dan memberi makan siang tukang yang mengerjakan renovasi rumahnya. Faktor penghambat lainnya yaitu **Keterbatasan alat pembangunan**, proses renovasi rumah tidak layak huni berlangsung sekitar satu bulan di setiap rumah. Proses pembangunan

ini dilaksanakan secara bergilir dari satu RT ke RT yang lain. Untuk menunjang proses pembangunan rumah ini dibutuhkan tukang untuk mengerjakannya. Tukang yang dibutuhkan dalam satu unit rumah sekitar 3-4 orang. Pemilihan tukang ini dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Akan tetapi peralatan dalam pembangunan rumah pun hanya mengandalkan peralatan yang dimiliki oleh tukang tersebut. Alat-alat penunjang proses pembangunan disiapkan secara swadaya oleh penerima bantuan dan tukang. Fasilitator tidak terlibat penuh dalam memfasilitasi alat pembangunan. Fasilitator hanya membantu mencari pinjaman peralatan yang dapat digunakan bersama seperti molen.

Sedangkan faktor pendukung dalam program PLPBK yaitu **Adanya tenaga fasilitator**, dengan adanya fasilitator ini dapat merencanakan, mengatur dan merelokasi kegiatan dalam program PLPBK. Fasilitator tidak hanya ditugaskan dalam masalah infrastruktur tetapi juga dalam perilaku sosial masyarakat yang berada di kawasan kumuh. Fasilitator sangat bermanfaat bagi program PLPBK di Desa Kemiri. Keberadaan fasilitator juga sangat membantu masyarakat penerima bantuan. Fasilitator tidak hanya mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat Desa Kemiri tetapi juga membantu masyarakat

memiliki pengetahuan untuk berperilaku hidup yang bersih dan menjaga permukiman yang sudah dibangun bersama. **Tingginya partisipasi masyarakat Desa Kemiri**, program PLPBK adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam program ini sangat membantu berjalannya keberhasilan program yang sukses. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan di setiap tahapan. Mulai dari tahap persiapan, masyarakat turut hadir dalam sosialisasi sebagai penerima bantuan yang mengetahui arahan pelaksanaan program. Dalam tahap perencanaan dan pemasaran sosial, masyarakat penerima bantuan berpartisipasi untuk turut menyetujui visi misi PLPBK Desa Kemiri. **Adanya relasi yang kuat**, Fasilitator tidak hanya melakukan inovasi dan mempengaruhi masyarakat mengambil keputusan tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan program. Dalam program PLPBK ini berlangsung di Desa Kemiri, banyak pihak yang terlibat dalam menyukseskan program ini bagi masyarakat. Bukan hanya fasilitator dan masyarakat penerima bantuan yang berada dalam relasi program PLPBK di Desa Kemiri. Di setiap tahapan kegiatan PLPBK, terdapat banyak pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah pusat hingga

masyarakat penerima bantuan. Pemerintah pusat sebagai penanggungjawab program PLPBK secara nasional. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Kebakkramat turut mendukung pelaksanaan program PLPBK di Desa Kemiri. Bagi pemerintah Desa Kemiri, program PLPBK ini sangat membantu warganya yang tidak memiliki rumah yang layak dan membantu warganya menikmati fasilitas umum yang bersih dan sehat. Pada kegiatan pelaksanaan program PLPBK, turut menghadirkan perangkat desa untuk melakukan pemetaan swadaya yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi lokasi dari potensi sosial dan ekonomi warga. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) juga melakukan analisis data dari hasil pemetaan swadaya tersebut. Adanya dukungan tersebut menjadi dukungan fasilitator dan masyarakat penerima bantuan dalam melaksanakan program PLPBK di Desa Kemiri karena dengan adanya pengarahan dan pengawasan kegiatan tersebut menjadi selesai tepat waktu dan berhasil membuat permukiman desa yang layak, bersih dan sehat.

Peran fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat penerima bantuan program PLPBK di Desa Kemiri, Kabakkramat, Karanganyar selama ini telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari segi pengetahuan, sikap dan tindakan. Adapun perubahan

yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kemiri yang telah mendapatkan pendampingan dari fasilitator selama program berlangsung adalah: *Segi pengetahuan*, masyarakat Desa Kemiri yang menerima bantuan program PLPBK telah mendapatkan berbagai pengetahuan baik terkait proses pengambilan keputusan maupun perawatan rumah layak huni. Hal ini terlihat dari masyarakat yang memiliki pengetahuan dirinya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sehingga masyarakat turut menentukan keputusan dalam hal penerimaan dana bantuan. Selain itu masyarakat yang dulunya terbiasa pengetahuan untuk merawat mereka yang telah direnovasi. *Segi tindakan*, pendampingan oleh fasilitator dilihat dari segi tindakan perubahannya adalah masyarakat penerima bantuan PLPBK di Desa Kemiri yang lebih kritis dan kreatif dalam memilih langkah selanjutnya. Ini dapat dilihat dengan adanya keputusan dari masyarakat untuk berpartisipasi selama tahapan kegiatan program PLPBK dan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka dalam rencana pembangunan permukiman.

Peran fasilitator dalam program PLPBK di Desa Kemiri dapat dianalisis dengan teori tindakan sosial dari Max Weber. Weber dalam Ritzer (2002: 60) menyebut teori tindakan berfokus

pada para individu, pola-pola dan regularitas-regularitas tindakan dan bukan pada kolektivitas. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber yaitu *Zwerk Rational*, yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerk rational* tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari suatu tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya tersebut. *Werkrational action*, di dalam tindakan dipilihnya itu merupakan suatu yang paling tepat untuk mencapai sebuah tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Di dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara mencapainya cenderung menjadi sulit untuk dibedakan. Namun, tindakan ini rasional, kepada pilihan terhadap cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe ini masih rasional meskipun tidak serasional yang tipe pertama. *Affactual action*, tindakan ini yang dibuat-buat, yang dipengaruhi oleh perasaan emosi aktor, tindakan ini sulit dipahami, kurang atau tidak rasional. *Traditional action*, tindakan yang didasarkan atas kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu.

Dari keempat tipe dasar tindakan sosial ditemukan fakta

bahwa tindakan fasilitator cenderung pada tipe tindakan *zwerk rational* (tindakan rasional instrumental). Seperti yang telah diketahui bahwa *zwerk rational* adalah tindakan sosial murni. Disini aktor bertindak atas dasar tindakan yang rasional. Tindakan fasilitator dikatakan sebagai tindakan sosial yang rasional karena fasilitator menjalankan kewajiban dan haknya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kewajiban yang dijalankan oleh fasilitator yaitu mengarahkan tindakan kepada orang lain seperti masyarakat penerima bantuan program dan perangkat desa saat menjalin relasi. Adapun kewajiban tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan keberhasilan program PLPBK di Desa Kemiri. Sedangkan hak yang dimaksud adalah tindakan nyata yang bersifat subjektif yang dapat dilihat saat fasilitator menjadi penyusun rencana program dan menjadi pihak yang bertanggung jawab saat program berlangsung.

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan fasilitator yang mempunyai pertimbangan dan tujuan ketika melakukan pemberdayaan masyarakat penerima bantuan PLPBK di Desa Kemiri. Fasilitator mempunyai tujuan untuk melaksanakan program yang ditugaskan dari pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan dalam tindakan rasional instrumental tersebut adalah suatu kondisi atau alat

(instrumen) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Fasilitator menggunakan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk memberdayakan masyarakat penerima bantuan dan menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait dengan program PLPBK. Fasilitator menggunakan alat berupa haknya sebagai penyusun dan penanggungjawab program PLPBK untuk mencapai tujuan program. Dengan menggunakan alat-alat yang dimiliki, fasilitator dapat mencapai tujuan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Fasilitator yang melaksanakan tugas dengan berperan melaksanakan pemberdayaan masyarakat akan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaannya dan dapat membantu masyarakat mendapatkan permukiman yang layak.

Kesimpulan

Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar merupakan desa yang menerima Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Peran fasilitator dalam program PLPBK yaitu sebagai sosialitator yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk mengenalkan program yang akan dijalankan, sebagai penyusun rencana yang melakukan pemetaan swadaya untuk mengidentifikasi lokasi penerima bantuan dan melakukan rembuk warga untuk menyepakati program dan jadwal kegiatan pelaksanaan. Fasilitator juga berperan sebagai pelaksana

kontruksi yang bertanggungjawab memantau dan mengawasi pada proses pembangunan RTLH serta pendamping masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat. Fasilitator berperan sebagai evaluator untuk mengevaluasi program PLPBK dengan masyarakat dan pemerintah terkait dan membuat laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Program PLPBK di Desa Kemiri memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat adalah kurangnya pendanaan untuk setiap unit renovasi rumah yang mengakibatkan masyarakat mencukupi dana tersebut secara swadaya serta keterbatasan alat pembangunan yang hanya mengandalkan alat dari tukang. Terdapat pula faktor pendukung yaitu adanya peran fasilitator yang bermanfaat, partisipasi masyarakat tinggi yang mau terlibat dalam program serta adanya relasi dari pemerintah pusat hingga masyarakat yang saling mendukung untuk mencapai tujuan program PLPBK.

Sutopo, H.B. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeth
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ritzer, George . 2002. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Kencana